

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Dari Buku:

- Al Haryono J. 2014. *Auditing (Pengauditan Berbasis ISA)*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- B.Romney, Marshall. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi Edisi 13*. Jakarta : Salemba Empat.
- Gunandi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia
- Halim, Abdul. et. al. 2016. *Perpajakan Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafari. 2015. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan Edisi Cetakan ke - 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan. 2012. *Manajemen SDM. Edisi Revisi, Cetakan Ke Tiga Belas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irianto. 2015. *Politik Perpajakan*. Yogyakarta: UJI Pers. Jakarta: Erlangga.
- Kartikahadi, H et.al 2012. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik – Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi
- Muljono. 2016. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulya Firdausy. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nurmantu. 2015. *Pengantar Ilmi Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar – Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Putera, Rahman. 2013. *Pengantar Akuntansi I Pendekatan Siklus Akuntansi*.

- Rahayu. 2012. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan Adaptasi IFRS*. Jakarta : Erlangga.
- Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- S.R, Soemarso. 2014. *Akuntansi : Suatu Pengantar 1 Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sadeli. Lili. 2016. *Dasar – Dasar Akuntansi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siregar. 2015. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama*. Yogyakarta: Unit Penerbit.
- Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sugiyono. 2012 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. 2018. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sumarsan, Thomas. 2012. *Pedoman Perpajakan Yang Lengkap berdasarkan Undang – undang Terbaru*. Jakarta: Indeks.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Sistem Pengendalian Manajemen Edisi 2*. Jakarta: PT Indeks.
- Sumyar. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Suwandi. Erly. 2014. *Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suwardjono. 2013. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.

Suwardjono. 2013. *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku I*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Warren et.al. 2014. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Widjaja, Amin. 2013. *Corporate Fraud dan Internal Control Edisi Ke 4*. Jakarta: Harvarindo.

Wirawan B. Ilyas. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba.

Zamzam, F. 2018 *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.

#### **Sumber dari Jurnal:**

Adityo Susilo. Et al. 2020. Coronavirus Disease 2019. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. Volume 7 Nomor 1. Tersedia: <http://repository.ump.ac.id>. [14 September 2022].

Andrea & Teguh. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Akuntansi. ISSN: 2540-9646. Volume 5 Nomor 1. Juni 2017. Tersedia: <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id>. [15 September 2022].

Eman Supriatna. 2020. Wabah Virus Disease Covid 19. Jurnal Sosial dan Budaya. ISSN 2654-9050. Volume 7 Nomor 6. Mei 2020. Tersedia: <https://www.researchgate.net>. [16 September 2022].

Herlina, Vivi. 2020. Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kerinci. Jurnal Benefita. ISSN 2477-7862. Mei 2020. Tersedia: <https://ejournal.lldikti.id>. [16 September 2022].

Khoriyah & Maruf. 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Leran Kecamatan Kalidatu Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Publika. Volume 10 Nomor 3. Tersedia: <https://ejournal.unesa.ac.id> [15 September 2022].

Nofiana, Martha & Yuli. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Menanggal Surabaya. Jurnal of Sustainability Business Research. ISSN:

2746-8607. Volume 2. Nomor 1. Maret 2021. Tersedia: <https://jurnal.unipasby.ac.id>. [15 September 2022].

Patriandari & Amalia Hanna. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib PBB-P2 Pada BAPENDA Jakarta Timur Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume 4 Nomor 1. Januari-Juni 2022. Tersedia: <https://uia.e-journal.id>. [15 September 2022].

Salamah Siti. 2018. Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB. *Jurnal Akuntansi*. ISSN: 2597-7202. Volume 2. Nomor 1. April 2018. Tersedia: <https://e-journal.unpima.ac.id>. [15 September 2022].

Siregar, Amelia et al. 2022. Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Syariah*. ISSN: 2657-1676. Volume 6 Nomor 1. Juni 2022. Tersedia: <https://media.neliti.com>. [15 September 2022].

Wardani, Dewi Kusuma dan Rumiya. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat di Samsat Drive Thru Bantul)*. *Jurnal Akuntansi* Vol.5.No.1 2017. Tersedia : <https://journal.uny.ac.id> [15 September 2022].

Wenny et al. 2019. Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Kantor Badan Pendaptan Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*. Volume 2 Nomor 1. 2019. Tersedia: <https://garuda.kemedikbud.go.id>. [15 September 2022].

Khupron Ahmad. 2021. *Analisis Sikap Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Masa Pandemi Covid-1 di Surakarta*. Tesis Pada Program Studi Manajemen FE Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Diterbitkan.

Zanuar, Abid & Haris. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2016. *Jurnal Akuntansi*. ISSN 2502-3764. Volume 2. Nomor 3. 2017. Tersedia: <https://jurnalekonomi.unsila.ac.id>. [15 September 2022].

### **Sumber dari Internet:**

Humas Pangandaran. 2022. *Pembda Pangandaran Launching SPPT PBB-P2*. [Online]. Tersedia: <https://humas.pangandaran.go.id>. [13 September 2022].

Online Pajak. 2018. *Syarat Pemungutan Pajak: Ini Pengertian, Dasar Hukum dan Penjelasan*. PT. Achilles Advanced Systems [online]. Tersedia: [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com). [13 September 2022].

Rahma, Y. 2021. *Penghapusan Sanksi Administrasi PBB Berlaku Hingga Desember, Warga Diimbau Membayar Pajak*. [Online]. Tersedia: <https://pikiran-rakyat.com.cdn.amproject.org>. [13 September 2022].

Tn. 2022. *Realisasi PAD Pajak 2021 di Pangandaran Tak Capai Target*. [Online]. Tersedia: <https://www.pangandaran.ruber.id>. [13 September 2022].

### **Sumber dari Undang-Undang:**

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Keputusan Menteri Keuangan No.201/KMK.04/2000 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPTKP)

Pasal 1 angka 10 Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan

Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 1 Undang–Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 11 ayat 1 PMK 242/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Pasal 11 Ayat 1-5 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tentang SPT

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 3 Ayat 3-4 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007.

Pasal 3 Undang-Undang No.12 Tahun 1994 Tentang Objek pajak yang tidak dikenakan PBB.

Pasal 4 Undang-Undang No.12 Tahun 1994 Tentang Subjek pajak yang tidak dikenakan PBB.

Pasal 41 Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) Tentang Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbaru

Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 1994 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan 2020

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 Tentang Sanksi Perpajakan.

Undang-Undang No.12 Tahun 1985 Pasal 2 Tentang Ketentuan Pengurangan Pajak

Undang-Undang No.12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.12 Tahun 1985 terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tanggal 9 November 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah

